

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia pasca Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, masih belum bisa untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sebab saat itu Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan hingga tahun 1949. Di tahun berikutnya, Indonesia memusatkan perhatian pada pembangunan politik yang pada saat itu belum stabil. Kemudian pada tahun 1950 Indonesia baru bisa memulai pembangunan ekonomi. Memasuki lima belas tahun pertama kemerdekaan Indonesia diwarnai dengan ketidakstabilan politik, kemerosotan ekonomi, dan ketegangan di beberapa daerah. Karena keadaan yang terus memburuk hingga terjadilah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 di Jakarta.¹

Secara bersamaan, gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin meluas. Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi negara memperburuk situasi yang berujung pada konflik politik.² Saat itu, mahasiswa yang aktif menentang kebijakan pemerintah dan menuntut segera dilaksanakannya Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), antara lain pembubaran PKI, pencopotan semua kabinet yang pro-Komunis atau tidak kompeten, dan penurunan harga.³ Atas permintaan mahasiswa tersebut, Presiden Sukarno menerima delegasi KAMI dan menjelaskan kepada mereka betapa buruknya situasi ekonomi Indonesia.

Tahun 1967, Indonesia dalam keadaan yang sangat kacau. Pendapatan per kapita turun di bawah pencapaian lima tahun sebelumnya. Inflasi telah merusak perekonomian secara parah.

¹ P.J. Suwarno, 2004: *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR Sampai Supersemar)*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, hlm. 61

² Alfian. 1978. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Kumpulan Karangan*. Jakarta: Gramedia. Hlm: 113

³ P.J. Suwarno, 2004: *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR Sampai Supersemar)*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Hlm: 61

Sektor pertanian tidak dapat lagi menyediakan cukup pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kemiskinan telah menjadi nasib sebagian besar penduduk.

MPRS NO.XXXIII/1967 menetapkan diangkatnya Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden pada tanggal 12 maret 1967 periode satu tahun. Yang mulai berlaku tanggal 22 februari 1967 dan di tanggal 27 maret 1968, ia diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketetapan MPRS NO. XLIV/1968.⁴

Awal masa pemerintahannya, Orde Baru menempuh jalan yang berbeda dengan Orde sebelumnya. Orde Baru mengarahkan pelaksanaan pembangunan kepada pembangunan di bidang ekonomi. Melalui kebijakan yang diambil pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya apalagi jika dilihat bahwa Orde Baru lahir dari situasi perekonomian yang mengalami stagflasi. Maka munculnya dapat diidentikan dengan kebangkitan *credo* atau kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.⁵

Perubahan sistem politik, dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila atau pemerintahan Presiden Soeharto, telah berubah pula arah dan kebijakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan inti dari demokrasi Pancasila di bidang ekonomi, artinya pemerintah melaksanakan pembangunan ekonomi sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan UUD dan batang tubuhnya.⁶ Perubahan kebijakan pembangunan ekonomi sangat penting untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi saat itu, sehingga diperlukan perencanaan yang efektif dan tepat sasaran. Rencana pembangunan bertujuan untuk

⁴ Soeharto: *Ucapan, Pikiran, dan Tindakan Saya, Otobiografi*, seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., op. cit., hlm. 188

⁵ Rudianto, D. (1985). *Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis di Indonesia*. Jakarta: PT. Golden Terayon. Hlm: 10

⁶ Soeharto: *Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua*, op. cit., hlm. 257.

menumbuhkan dan memastikan bahwa proses pembangunan terus berlanjut. Hal ini dapat terjadi apabila faktor-faktor strategis dari proses pembangunan telah dikontrol sepenuhnya dalam usaha perencanaan dan hal ini diketahui secara jelas dalam masyarakat tertentu. dengan kata lain, memahami secara mendalam hakikat proses pembangunan adalah suatu hal yang mutlak sebelum menentukan cara pendekatan yang akan menjamin berhasilnya usaha perencanaan.⁷

Sejarah perekonomian Indonesia mencatat bahwa langkah-langkah yang diambil pada masa-masa awal pemerintahan Presiden Soeharto memiliki arti yang strategis. Pengelolaan ekonomi makro untuk menjamin stabilitas ekonomi dengan pengendalian inflasi masih menjadi prioritas utama hingga saat ini. Anggaran berimbang, devisa bebas, dan investasi asing merupakan hal yang tabu di masa lalu, menjadi dasar kebijakan Presiden Soeharto yang sangat menentukan perkembangan ekonomi Indonesia selanjutnya.⁸

Banyak orang memuji dan mengagumi transformasi ekonomi Indonesia yang terjadi dari akhir 1960-an hingga pertengahan 1990-an. Dinamika perekonomian Indonesia dipandang sebagai keajaiban, kinerjanya mengesankan, selalu stabil dan mantap, serta diharapkan terus tumbuh secara berkelanjutan.⁹ Setelah lebih dari satu dasawarsa melaksanakan pembangunan ekonomi, Indonesia kemudian dikategorikan sebagai salah satu kisah sukses dari sejumlah negara Asia dalam pertumbuhan ekonominya. kemudian pada awal tahun 1990-an, keberhasilan dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadikan Indonesia diklasifikasikan sebagai kelompok negara berkembang yang akan menjadi negara

⁷ Nitisastro, W. 2010. *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian*. Jakarta: Kompas. Hlm: 11

⁸ Anwar, Arsjad, Ananta, Aris, dkk. *Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro*. 2007 Jakarta: Kompas, hlm 312

⁹ Budi, Rajab. Negara Orde Baru: Berdiri Di Atas Sistem Ekonomi Dan Politik Yang Rapuh. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 6, No. 3, November 2004. Hlm: 183

industri baru (*newly industrialized country*), mengikuti jejak negara-negara di Asia lainnya, seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong.¹⁰

Soeharto dalam mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi ini tentu tidak sendirian, banyak tokoh di belakangnya yang ikut berperan. Widjojo Nitisastro merupakan salah satu tokoh dengan peran yang sangat menonjol dalam perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru.

Widjojo Nitisastro lahir pada tanggal 23 September 1927 di Malang, Jawa Timur. Setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1955 dengan *judicium cumlaude*, beliau kemudian langsung diangkat menjadi Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI, menggantikan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Kemudian tahun 1957 melanjutkan studi dalam ekonomi dan demografi di University of California Berkeley, California, AS, dan pada Mei 1961 memperoleh gelar Ph.D ilmu ekonomi. Tanggal 1 juni 1962 diangkat sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi UI dengan pidato pengukuhan berjudul Analisa Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan yang disampaikan pada 10 Agustus 1963. Selama 1964 -1968 menjadi Dekan Fakultas Ekonomi UI. Di samping itu juga menjadi Direktur Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional atau Leknas dari Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI dan tenaga pengajar pada Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat atau Seskoad dan Akademi Hukum Militer atau AHM.¹¹

Widjojo Nitisastro kemudian diangkat sebagai Ketua Tim Bidang Ekonomi dan Keuangan dari Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet pada tahun 1966 dengan anggota: Prof. Dr. Mohammad Sadli, Prof. Dr. Subroto, Prof. Dr. Ali Wardhana, dan Prof Emil Salim. Pada tahun

¹⁰ Hill, Hal. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966; Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*. 1996 Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm 5

¹¹ Anwar, Arsjad, Ananta, Aris, dkk. *Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro*. 2007 Jakarta: Kompas, hlm 13

1968 diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Ekonomi Presiden, dengan keanggotaan tim yang diperluas. Tanggal 20 Juli 1967 pada usia 39 tahun diangkat sebagai ketua Bappenas yang dijabatnya hingga tahun 1983. Tanggal 9 September 1971 diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan dan tahun 1973-1983 menjabat sebagai Menko Ekuin atau Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri. Sejak 1983 menjadi penasihat Ekonomi Pemerintah.

Tahun 1967-1983 menjadi ketua delegasi ke berbagai sidang internasional, diantaranya: *Intergovernmental Group on Indonesia* atau IGGI, *Paris Club*, dan lain-lain. Di samping itu menjadi anggota *South Commission* Ketua: Julius Nyerere dan *Policy Board* dari *Inter-Action Council* ketua : Helmut Schmidt.¹²

Kondisi ekonomi yang memburuk pada pertengahan 1960-an mendorong para aktivis pemuda dan ekonom mengajukan ide-ide baru untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Pada tahun 1966 Universitas Indonesia mengadakan dua kali pertemuan besar. Pertama pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 10-20 Januari 1966, yaitu seminar ekonomi keuangan yang diselenggarakan oleh KAMI FEUI. Kedua adalah Simposium Kebangkitan Semangat 66: Menjelajah *Tracee* Baru, yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dan KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) dari tanggal 6 sampai 9 Mei 1966. Di antara dua peristiwa penting ini, terjadi peristiwa 11 Maret 1966, dan akibatnya komposisi pemerintahan berubah dalam penanganan masalah di Indonesia dan berbagai persoalan ekonomi.¹³

Munculnya elit profesional di era Orde Baru merupakan jawaban atas kesulitan sosial dan ekonomi pada masa peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Sebagian besar para teknokrat ini berasal dari lingkungan FE UI, diantaranya Emil Salim, Ali Wardhana, J.B. Sumarlin, Saleh Afiff, Subroto, Muhammad Sadli, dan tentunya Widjojo Nitisastro. Setelah lulus

¹² *Ibid.* hlm: 17-18

¹³ Nitisastro, W. 2010. *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian*. Jakarta: Kompas. Hlm: 45

Sarjana, mereka pergi ke luar negeri untuk belajar dengan pendanaan dari *Ford Foundation*. Setelah menyelesaikan tugas belajarnya, Soeharto lantas memanggil mereka pulang. Mereka kemudian masuk ke dalam birokrasi Orde Baru, dengan memegang peran dan posisi krusial dalam struktur ekonomi.

Masuknya teknokrat ke dalam lembaga pemerintah belum pernah terjadi sebelumnya. Secara bersamaan, hal tersebut telah mengubah sifat dan arah pengambilan keputusan publik yang berfokus pada aspek ekonomi. Singkatnya, ekonomi harus menjadi bidang ideologi dan politik yang netral. Widjojo Nitisastro menilai, penurunan ekonomi Indonesia terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap perekonomian. Penyelesaian masalah ekonomi tidak didasarkan pada prinsip ekonomi rasional, akan tetapi hanya secara politik.¹⁴

Widjojo Nitisastro juga berpendapat bahwa perekonomian Indonesia berada dalam masa transisi yang sangat penting pada tahun 1968. Pemerintah harus menempuh jalur stabilitas dan rehabilitasi ekonomi dalam mengatasi kekacauan ekonomi sebelumnya yaitu dengan cara: (1) Membereskan rumah tangga melalui langkah-langkah fiskal dan moneter, (2) Lebih banyak mendasarkan diri pada prinsip ekonomi yang sehat dengan cara memberikan kebebasan yang lebih besar serta insentif lebih banyak; dan (3) Membangun kembali hubungan ekonomi yang sehat dengan negara-negara lain di dunia.

Kedudukan Widjojo Nitisastro selaku Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kemudian Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dalam masa pemerintahan Orde Baru membuka kesempatan memanfaatkan kemampuan analisa ekonominya bagi perencanaan pembangunan Indonesia.

¹⁴ Triaswati, N. Soesastro, H. Dkk. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir* Jilid III. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hlm: 24

Pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia menjadi menarik untuk diteliti. *Pertama* Para teknokrat yang memasuki struktur pemerintahan merupakan pandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. *Kedua* tampilnya Widjojo Nitisastro dengan memperkenalkan konsep-konsep pembaharuan kebijakan ekonomi ternyata berhasil bukan saja menghentikan kemerosotan ekonomi, tetapi juga memajukan kehidupan ekonomi yang dilanjutkan dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang terencana dan berkesinambungan, dan berlanjut hingga saat ini, maka tidak heran apabila muncul satu pendapat bahwa membicarakan kemajuan ekonomi Orde Baru maka Widjojo Nitisastro adalah konseptornya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Pemikiran Widjojo Nitisastro Terhadap Perekonomian Indonesia 1966-1998”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal pemerintahan Soeharto ?
2. Bagaimana pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia ?
3. Bagaimana Dampak pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia ?

1.3. Fokus Penelitian

1.3.1. Ruang Lingkup Temporal

Mengenai batasan temporal penelitian ini akan berfokus pada tahun 1966-1998. Penulis berpendapat bahwa pada tahun 1966 pemikiran Widjojo Nitisastro menjadi jawaban atas keterpurukan ekonomi Indonesia pasca kebijakan ekonomi terpimpin. Penulis membatasi periode penelitian hingga tahun 1998, karena pada pertengahan 1997, timbulah krisis moneter dan ketegangan sosial yang mengakibatkan berakhirnya masa pemerintahan Soeharto yang ditandai

dengan penyerahan jabatan presiden Soeharto kepada wakil presiden B.J Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

1.3.2. Ruang Lingkup Spasial

Mengenai batasan Spasial penelitian yang dilakukan adalah di pulau Jawa khususnya Jakarta, karena Jakarta merupakan Ibukota yang menjadi pusat pemerintahan Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami perekonomian Indonesia pada masa awal pemerintahan Soeharto.
2. Untuk mengetahui pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto.
3. Untuk mengetahui Dampak pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis, maupun praktis, diantaranya:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia Khususnya pada tahun 1966-1998, serta juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis masih dipelajari dalam dunia pendidikan.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Tulisan ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi semua orang yang ingin mengetahui bagian dari perjalanan sejarah pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menulis tema yang sama dengan judul dan bahasan yang berbeda tentunya.

2. Bagi Universitas Jambi.

Dapat menambah bahan bacaan yang berguna bagi pembaca baik yang berada di lingkungan Universitas Jambi maupun bagi pembaca yang berada di luar Universitas Jambi mengenai perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto, khususnya mengenai pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto.

3. Bagi Penulis.

Dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah sebagai aplikasi teori yang didapat selama perkuliahan untuk menarik sebuah kesimpulan dari permasalahan yang ditemukan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah dalam kehidupan praktis. Selain itu untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menulis karya ilmiah khususnya tentang pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto.

1.6. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa karya tulis dalam bentuk jurnal, yang mengungkapkan tema-tema yang dapat dibandingkan oleh penulis untuk membahas sejauh mana masalah tersebut. Karya-karya yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Fajar Nur Alam, pada tahun 2016 dengan judul *Widjojonomics Sampai Habibienomics (Perbedaan Pandangan Pemikiran Ekonomi dari Widjojo Nitisastro dan BJ Habibie terhadap perekonomian Indonesia pada Masa Orde Baru 1971-1999)* penelitian ini membahas perbedaan paradigma pembangunan antara Widjojo Nitisastro dan B.J. Habibie yang membuat kedua kelompok ekonomi ini jauh dari kesan akur dan kolaboratif. Berdasarkan kedua pemikiran tokoh tersebut berdampak kepada kebijakan perekonomian Indonesia dimana pada awal pemerintahan Orde Baru para teknokrat yang dipimpin oleh Widjojo Nitisastro memberikan gagasan pada permasalahan perekonomian Indonesia pada saat itu yaitu modernisasi sistem ekonomi yang mencakup pasar, fiskal dan utang luar negeri yang diharap melahirkan *trickle down effect*, dan solusinya untuk perkembangan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia telah dilakukan. Akan tetapi semua gagasannya tidak terlaksana dengan baik oleh pemerintah saat itu.

Kiprah Widjojo Nitisastro mulai luntur dikarenakan para teknokrat gagal mengatasi krisis pada tahun 1980-an. Permasalahan lain yaitu, mengenai pendapatan Indonesia yang hanya mengandalkan produksi dari sumber daya alam yang dijual ke pasar internasional kurang mendapatkan hasil yang besar mengingat Indonesia masih mempunyai utang lama dan utang baru yang semakin bertambah, dan pada saat itu pula muncul para teknolog yang dipimpin oleh B.J Habibie dengan membawa berbagai gagasannya untuk memajukan perekonomian Indonesia. Perekonomian harus dikembangkan melalui perebutan teknologi canggih untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Habibie beranggapan jangan

hanya menjadi negara yang hanya bisa memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif tetapi harus pula memiliki keunggulan kompetitif, dengan mengandalkan nilai tambah dan teknologi yang inovatif pada sektor industri. Akan tetapi gagasan dari B.J Habibie juga tidak terlaksana dengan baik dikarenakan utang Indonesia ke bank dunia terus melonjak naik, krisis moneter, dan inflasi yang terjadi pada akhir 1990-an, membuat IPTN programnya dihentikan atas desakan dari IMF dan selanjutnya dibubarkan.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Yunani Hasan pada tahun 2014 dengan judul *Situasi Politik dan Ekonomi pada awal pemerintahan Orde Baru*. Proses pergantian pimpinan nasional terjadi pada tanggal 23 Februari 1967, ketika presiden Soekarno secara resmi menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengembalian Ketetapan TAP MPRS No.IX/MPRS/1996. Kemudian dalam sidang MPRS 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto diangkat menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia. Setahun kemudian yaitu pada tanggal 27 Maret 1968 beliau dikukuhkan menjadi Presiden RI yang kedua.

Dalam melakukan Rehabilitasi dibidang politik dan keamanan (Polkam), Presiden Soeharto melakukannya dengan pendekatan keamanan. Kebijakan itu didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan Negara pada umumnya, dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Sebagai tindak lanjut atas kekacauan yang terjadi masa Orde Lama, pemerintah Orde Baru mengadakan beberapa sidang MPRS dengan menghasilkan beberapa ketetapan diantaranya TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/66 tentang pembaharuan dan pembangunan.

Beban berat yang harus dipikul oleh Orde Baru adalah penyelamatan ekonomi nasional terutama berupa usaha melunakan inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Kenaikan harga pada awal tahun 1966 menunjukkan

tingkat inflasi sekitar 650% tidak memungkinkan pemerintah untuk segera melakukan pembangunan, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi berarti pengendalian inflasi, supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Sedangkan rehabilitasi adalah rehabilitasi secara fisik sarana dan prasarana ekspor dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan.

Ketiga, jurnal dengan judul *Menelisik Program Pembangunan Nasional di Era pemerintahan Soeharto*. Yang ditulis oleh Yeby Ma'asan Mayrudin pada tahun 2018. Jurnal ini membahas persoalan kebijakan program pembangunan nasional pemerintah Orde Baru berpedoman pada konsep yang dipegang teguh pada masa kekuasaannya yaitu konsep Trilogi Pembangunan yang terdiri dari tiga poin kunci yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional

Pemerintahan Soeharto di masa awal kekuasaannya melakukan langkah fundamental terkait penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang, meletakkan dasar-dasar untuk kehidupan nasional terkait politik, hukum, dan sosial. Di bidang ekonomi upaya perbaikan dimulai dengan program stabilitas dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan skala prioritas diantaranya yaitu pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, dan pencukupan kebutuhan sandang.

Indonesia dibawah Orde Baru berhasil menempatkan Indonesia sebagai Negara berpendapatan menengah. Kenaikan pendapatan ini dimungkinkan berkat meningkatnya sumbangan industri manufaktur pada Produk Domestik Bruto sehingga membawa Indonesia pada masa itu ke pintu gerbang Negara industri. Disamping itu, deregulasi dan liberalisasi ekonomi yang dipakai oleh pemerintah ditujukan untuk menaikkan daya saing

produsen dalam negeri. Artinya, memperkecil investasi pemerintah dalam ekonomi. Peranan pemerintah adalah memelihara konsistensi dalam kebijakan ekonomi makro yang bermuara pada dikendalikannya inflasi sedapat mungkin dibawah 5% pertahun.

Mendorong Dengan lebih aktifnya sektor swasta, maka peranan kebijakan moneter dan pengkreditan menjadi lebih aktif ketimbang kebijakan anggaran. Anggaran yang berimbang tidak lagi memadai dan diperlukan kebijakan surplus anggaran. Ini adalah salah satu contoh dan dampak perubahan globalisasi ekonomi pada kebijakan ekonomi dalam negeri. Dalam konteks eksternal, peranan pinjaman dari luar secara berangsur cenderung berkurang sementara investasi asing semakin meningkat. Hal ini adalah konsekuensi logis dari liberalisasi ekonomi. Dalam konteks ini mobilisasi *resources domestic*, baik melalui pajak maupun tabungan, semakin mencuat ke atas.

1.7. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan teori *Trickle down Effect* yang dikembangkan pertama kali oleh Hirschman (1954). *Trickle down effect* merupakan salah satu pendekatan dalam strategi tidak langsung pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesejahteraan yang menekankan pada munculnya pertumbuhan ekonomi. Dikatakan tidak langsung karena proses pemerataan kesejahteraan dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor utama dan kemudian sektor utama tersebut akan menyebarkan hasil pertumbuhan ekonomi tersebut ke sektor lainnya. Hirschman juga menyarankan agar membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan supaya dapat menciptakan pengaruh-pengaruh penyebaran pembangunan yang efektif. Kesempatan investasi, lapangan kerja, dan upah buruh relatif tinggi lebih banyak terdapat di pusat-pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, investasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi

yang diutamakan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dalam *trickle down effect*.¹⁵ Teori ini dipilih karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis seperti yang dijelaskan di bawah ini

Perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia semenjak kemerdekaan mengalami pasang surut. Tahun 1945-1966 adalah masa transisi di bidang perekonomian karena sebagian besar kegiatan domestik dibebani krisis politik tanpa akhir. Sistem ekonomi yang diterapkan pada saat itu mengarah pada sistem ekonomi sosialis dengan cara dominannya peran pemerintah melalui BUMN-BMUN. Puncaknya, pada tahun 1966 ekonomi ambruk yang ditandai dengan tingginya inflasi, pengangguran tak terbandung dan kemiskinan kian bertambah.¹⁶

Munculnya orde baru merupakan respon atas kegagalan orde lama. Orde baru menggantikan orde lama yang mengacu pada era Soekarno. Orde Baru lahir pada tahun 1966 ketika Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dikeluarkan dan kemudian menjadi dasar legalitasnya. Tujuan orde baru adalah memulihkan seluruh tatanan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara semata-mata untuk penyelenggaraan Pancasila dan UUD 1945,¹⁷ dan dengan Supersemar ini kekuasaan Sukarno, dan sistem politik demokrasi terpimpin mulai menghilang. Selanjutnya lengsernya Presiden Soekarno diperkuat sesuai dengan ketetapan MPRS yang mengangkat

¹⁵ Larasati, Dwi (2017). *Trickle Down Effect Sektor pariwisata Kota Batu Tahun 2007-2015*. Malang: Universitas Brawijaya. Hlm: 4

¹⁶ Udiyana, dkk. *Struktur dan Sistem Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru*. FORUM MANAJEMEN, 2008 Volume 6, Nomor 1, hlm, 41

¹⁷ Nugroho Notosusanto. 1985. *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*, dalam: Pancasila Ideologi dan dasar Negara RI. Dep-pen. Hlm31

Letnan Soeharto sebagai pejabat presiden melalui rapat khusus pada tahun 1967. Kemudian pada Maret 1968, MPRS mengangkat dan mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai presiden.¹⁸

Masalah ekonomi orde lama merupakan beban berat yang diwariskan kepada Orde Baru. Awal masa pemerintahan Soeharto timbul situasi ketidakpastian, keamanan tidak terjamin dan kehidupan ekonomi terganggu, sepertinya tidak ada harapan lagi bagi Indonesia untuk meraih kemajuan, apalagi bila perubahan tersebut diinginkan secara cepat. Sejak tahun 1950, tingkat produksi dan investasi di berbagai sektor menunjukkan penurunan. Pendapatan riil per-kapita pada tahun 1966 lebih rendah dibandingkan pada tahun 1938.¹⁹

Menanggapi situasi yang demikian muncul para pemikir ekonomi dari Kelompok teknokrat negara yang melakukan suatu upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang demikian terpuruk. Widjojo Nitisastro merupakan tokoh yang sangat berperan penting dalam masa pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru, demi memperbaiki perekonomian dalam negeri. Posisi Widjojo Nitisastro sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Koordinator Bidang ekonomi, Keuangan dan Industri pada masa Pemerintahan Orde Baru memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan analisis ekonomi dari rencana pembangunan Indonesia, khususnya rencana pembangunan lima tahunan.²⁰ Banyak pikiran besar dilaksanakan pada waktu Widjojo menjabat sebagai Menko Ekuin, Menteri Perencanaan dan Ketua Bappenas. Saat memimpin Bappenas, Widjojo menyusun perencanaan ekonomi yang tertuang dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

¹⁸ Marwati Djoenet Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia* VI. 1984. Jakarta : Balai Pustaka, hlm 415

¹⁹ Udiyana, dkk. *Struktur dan Sistem Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru*. 2008 FORUM MANAJEMEN, Volume 6, Nomor 1, hlm, 46

²⁰ Emil Salim. (2009) dalam Nitisastro, W. *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian*. 2010 Jakarta: Kompas. Hal: 26

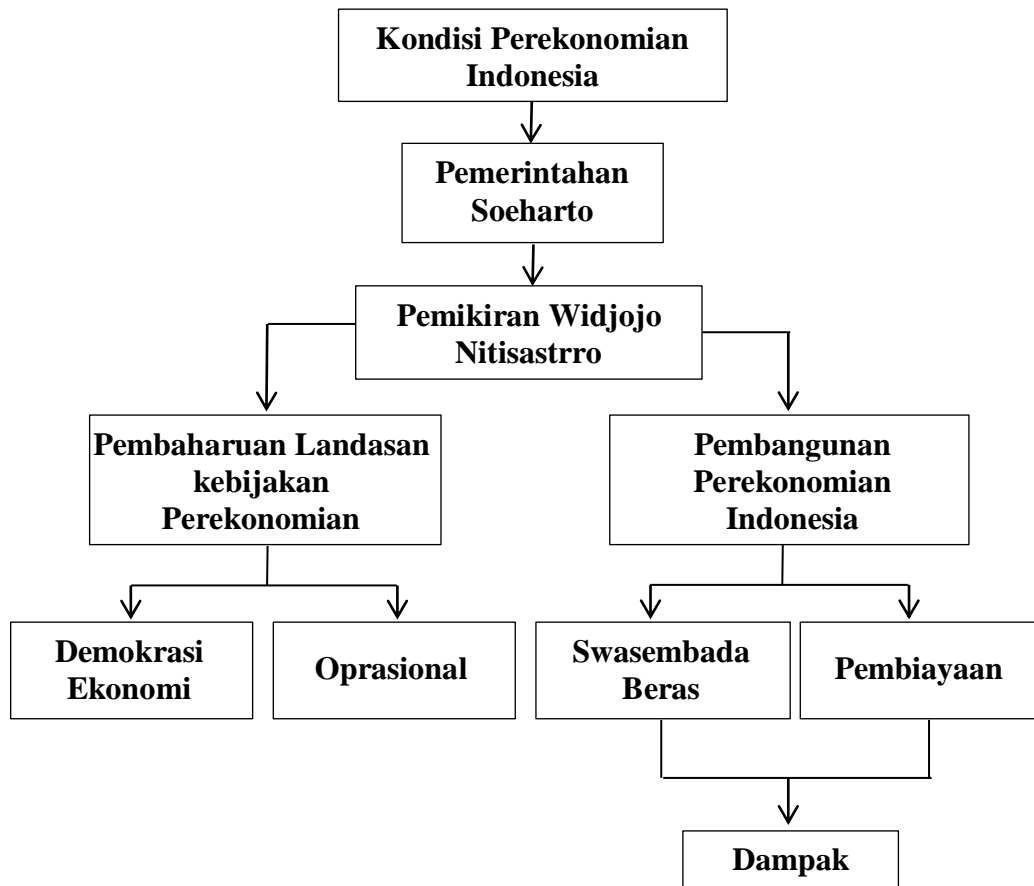
Repelita pertama mencakup tahun 1968-1972, dengan sektor pertanian memegang peranan sentral, khususnya produksi pangan. Pertanian adalah sektor yang dominan di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan berpenduduk terbesar jumlahnya, namun terendah pendapatannya. Maka sudah sewajarnya bila Repelita pertama ini menempatkan pertanian mencapai Swasembada pangan sebagai fokus utama yang sekaligus dapat menarik perkembangan sektor-sektor lain.

Munculnya UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA (Penanaman Modal Asing) jelas merupakan pintu pembuka upaya pemerintah untuk mempersilahkan investasi asing masuk Indonesia. Masuknya PMA itu, menurut pemerintah akan menguntungkan Indonesia dalam dua segi sekaligus; menciptakan investasi baru pemerintah tanpa mengeluarkan modal (di mana faktor ini menjadi kendala terpenting) dan membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia. Dari sisi penawaran, investasi tersebut akan menyediakan beragam produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat, sedangkan di sisi permintaan investasi membuka lapangan pekerjaan baru yang berakibat meningkatnya pendapatan serta menguatnya daya beli masyarakat.²¹

IGGI (*Inter-Government Group on Indonesia*) yang terdiri dari negara-negara maju dan lembaga internasional seperti *IMF* dan *World Bank*, juga masih dalam bingkai besar sifat strategi pembangunan ekonomi tersebut sehingga turut mempercepat proses pembangunan ekonomi yang telah dirancang oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan-kebijakan yang bersemangat mekanisme pasar bisa dilihat dari berbagai macam keputusan mengenai tekad pemerintah untuk tidak melakukan intervensi yang terlalu banyak dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan-kebijakan itu antara lain meliputi: kebebasan melakukan

²¹ Udiyana, Pradnyana, Astini. *Struktur Dan Sistem Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru*. Jurnal FORUM MANAJEMEN, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2008. Hlm: 47

ekspor dan impor, hak kepemilikan yang tidak dibatasi, pembentukan harga yang ditentukan oleh proses permintaan dan penawaran, dan menjaga struktur pasar agar tidak bersifat monopolis. Pemerintah hanya melakukan campur tangan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang diamanatkan oleh UUD 1945 serta bidang-bidang tertentu yang memenuhi kelayakan untuk diintervensi, seperti sektor pertanian. Dengan ciri semacam itu diharapkan alokasi faktor-faktor produksi bisa berjalan secara efisien.



1.8. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari akar kata metode (methodos), dari bahasa Yunani yang berarti jalan menuju sesuatu, dan logos berarti pengetahuan. Oleh karena itu, metode dapat didefinisikan sebagai metode memperoleh pengetahuan atau metode untuk menyebarkan pengetahuan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan pendekatan Studi Pustaka. Terdapat beberapa tahapan pada metode dalam melakukan penelitian sejarah yaitu Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi.²²

1. Heuristik.

Tahap pertama adalah heuristik yaitu pengumpulan sumber yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber sejarah, data sejarah ataupun jejak sejarah.²³ Heuristik juga dapat diartikan sebagai proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang dianggap relevan dengan pembahasan yang akan dikaji. Usaha mencari dan menemukan sumber-sumber untuk penelitian sejarah peneliti mengadakan klasifikasi atau penggolongan dari beberapa sumber. Sumber-sumber yang didapatkan penulis berupa sumber Primer dan Sekunder

Sumber Primer yang sesuai dengan penulisan ini adalah berupa buku karya Widjojo Nitisastro sendiri yang berjudul *Pengalaman Pembangunan Indonesia* dengan sub-judul *Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro* yang di dapat dari *Online Shop*, Perpustakaan, dan Internet.

Penulis juga menggunakan sumber-sumber Sekunder berupa buku diantaranya:

- 1) Kesan para Sahabat Widjojo Nitisastro. Penyunting Moh. Arsjad Anwar, Aris Ananta, Ari Kuncoro.

²² Ismaun. *Sejarah Sebagai Ilmu*. 2005. Bandung: Historia Utama Press, hlm 125

²³ Lilik Zulaicha. "*Metodelogi Sejarah*". (Surabaya : Uin Sunan Ampel Surabaya. 2007). hal 17.

- 2) Widjojo Nitisastro 70 Tahun. Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan dan pelaksanaan Jilid 1 dan 2. Penyunting Moh. Arsjad Anwar, Aris Ananta, Ari Kuncoro.
- 3) Jalur baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin (*The Leader, the Man and the Gun*). Pecan Ceramah dan Seminar KAMI.
- 4) Ekonomi Orde Baru. Penyunting Anne Booth dan Peter McCawley.
- 5) Sejarah Indonesia Modern. Karya M.C. Ricklef.

Buku-buku ini didapat dari:

- 1) Online Shop.
 - 2) Perpustakaan Universitas jambi.
 - 3) Internet.
2. Kritik Sumber.

Kritik terhadap sumber data adalah investigasi data historis. Langkah ini untuk menentukan keaslian (otentisitas sumber) dan kredibilitas (kepercayaan) sumber.²⁴ Kritik sumber terutama dimanifestasikan dalam sumber tertulis, karena setiap sumber memiliki aspek eksternal dan internal. Aspek eksternal berkaitan dengan apakah sumber tersebut merupakan sumber yang sebenarnya dibutuhkan. Artinya kritik eksternal dirancang untuk menguji keaslian sumber, sehingga sumber yang diperoleh benar-benar otentik.

Kritik internal bertujuan untuk menguji keakuratan informasi dalam sumbernya. Artinya, peneliti atau sejarawan harus menentukan seberapa andal fakta yang diperoleh dari sumber sejarah.²⁵

3. Interpretasi.

²⁴ Koentowijoyo, 1995: Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta, Benteng Budaya, hlm. 99-100.

²⁵ Daliman, "*Metode Penelitian Sejarah*". (Yogyakarta : Penerbit Ombak. 2012). hal 65.

Interpretasi merupakan suatu tahapan atau kegiatan menafsirkan serta menetapkan makna yang terkandung dalam fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah berdasarkan informasi yang didapatkan. Diperlukan penjelasan, karena pada dasarnya agar bukti sejarah dapat mengungkap realitas masa lampau diperlukan informasi dari luar, yaitu peneliti atau sejarawan. Sejarawan bertindak sebagai pengungkap signifikansi sejarah yang dijelaskan dari fakta atau bukti sejarah.²⁶

4. Historiografi.

Tahapan historiografi merupakan tahapan dimana hasil penjelasan tentang fakta dituliskan dan dilakukan upaya merekonstruksi masa lalu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Oleh karena itu, historiografi adalah tahap penafsiran lanjutan, dan kemudian ditulis sebagai cerita yang menarik.

Tahapan historiografi ini, perlu untuk mengamati dan mengungkapkan data seakurat mungkin untuk menulis hasil yang akurat. Oleh karena itu, pengolahan data harus dilakukan dengan cermat untuk mengurangi faktor subjektif. Meski begitu, unsur ini akan selalu ada di semua karya sejarah, karena sejarah secara obyektif dianggap sebagai persepsi subjek. Tentu saja, masukan tidak akan pernah tetap murni, tetapi akan diwarnai sesuai selera subjek.²⁷

Pada tahapan historiografi ini, hasil interpretasi fakta dituangkan dalam sebuah cerita sejarah yang harmonis. Oleh karena itu, tahapan di atas telah diatur dengan benar. Dengan mempelajari tahapan-tahapan tersebut, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa karya seorang sejarawan adalah menghasilkan karya ilmiah yang bernilai sejarah.

1.9. Sistematika Penulisan

²⁶ *Ibid*, hal 81

²⁷ Sartono Kartodirdjo, 1992: *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 62

Adapun sistematika dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian. Bab ini disertai mengenai ketertarikan penulis dalam memilih permasalahan yang diangkat. Bab ini juga berisi rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Bab ini akan dibahas tentang bagaimana kondisi perekonomian Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada awal pemerintahan Soeharto.
- BAB III** : Pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia 1966-1998. Bab ini membahas tentang pemikiran Widjojo Nitisastro dalam pembaharuan Landasan Kebijakan Perekonomian Indonesia dan dan pembangunan Perekonomian Indonesia ditinjau dari pelaksanaan dan pembiayaannya.
- BAB VI** : Dampak pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap perekonomian Indonesia 1966-1998. Bab ini dibahas tentang dampak pemikiran Widjojo Nitisastro terhadap Pelaksanaan dan Pembiayaan pembangunan ekonomi Indonesia.
- BAB V** : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian, dan saran.